

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Oleh

Rangga Reksa Wisesa

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sehingga dalam hal pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual, sehingga untuk mengimplemetasikan restitusi tentunya diperlukannya keseimbangan antara produk hukum yang mengatur terkait dengan restitusi dan penegak hukum yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual ? (2) Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: bahwa pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual sudah diatur dalam peraturan perundang -undangan agar dapat dilaksanakan dan memberikan perlindungan hukum baik anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Bahwa proses pengajuan restitusi oleh pihak korban dapat diajukan ke tahap penyidikan dan sesudah putusan uan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pengajuan restitusi dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang memutus perkara tersebut. Faktor penghambat terhadap pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban yaitu karena kurangnya informasi terhadap regulasi pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban

kejahatan seksual kepada masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga kurangnya difasilitasi penuh oleh pemerintah, dengan demikian penegak hukum dan pihak korban tidak paham secara jelas mengenai pelaksanaan teknis pengajuan permohonan restitusi.

Saran dari penelitian ini adalah agar peraturan terkait pengajuan restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual dapat disosialisasikan kepada penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat memahami dengan baik serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Kemudian bagi aparat penegak hukum, walaupun pihak korban tidak mengajukan restitusi tetapi dalam sidang pembuktian terdapat kerugian yang jelas diderita oleh korban maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan dan diputuskan dalam amar putusan oleh majelis hakim, dengan hal ini majelis hakim dapat memberikan penemuan hukum sehingga dapat menjadi yurisprudensi dan pedoman bagi penegak hukum lainnya.

Kata kunci: pemenuhan hak, restitusi, anak korban kejahatan seksual.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO RESTITUTION OF CHILDREN AS VICTIM SEXUAL CRIMES

BY

Rangga Reksa Wisesa

Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator of a criminal act based on a court decision with permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heirs. So that in terms of fulfilling the right to restitution of children as victims of sexual crimes, So to implement restitution, of course, a balance is needed between legal products that regulate related to restitution and law enforcement that implements laws and regulations. The problems in this study are as follows: (1) how is the implementation of the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes?

This research uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. The data sources used are primary data, and secondary data. Primary data is data obtained from research in the field by conducting interviews with respondents, while secondary data is data obtained from literature.

Based on the results of research and discussion, it is concluded: that the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes has been regulated in laws and regulations so that they can be implemented and provide legal protection for both children as victims of sexual crimes, this is stated in government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution of Children Who Are Victims of Criminal Acts and Supreme Court Regulation number 1 of 2022 concerning procedures for completing applications and providing restitution and compensation to victims of criminal acts. That the process of applying for resitution by the victim can be submitted to the investigation stage and after the verdict has permanent legal force, then the application for restitution can be through the Witness and Victim Protection Agency so that it can be submitted to the court authorized to decide the case. The hindering factor in the fulfillment of the right to restitution of children as victims is due to the lack of information on the regulation of restitution arrangements for children as victims of sexual crimes to the community and law enforcement officials so that the lack of full facilitation by the government, thus law

enforcement and victims do not understand the technical implementation of submitting restitution applications.

The suggestion of this study is that regulations related to the complaint of child restitution as victims of sexual crimes can be socialized to law enforcement and the public so that they can understand well and provide legal protection to children as victims of sexual crimes. Then for law enforcement officials, even though the victim did not apply for restitution but in the evidentiary hearing there was a clear loss suffered by the victim, this matter can be taken into consideration and decided in a judgment by a panel of judges, with this the panel of judges can provide legal findings so that it can become jurisprudence and guidelines for other law enforcement.

Keywords: fulfillment of rights, restitution, child victims of sexual crimes.